



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Akrobat Menggapai Cirebon Bahagia

Fitri di Tengah Pandemi



Tak mudah redaksi menggarap edisi ini. Penuh tantangan: berpuasa, di tengah pandemi, dan pembatasan sosial. Namun, itu justru memacu adrenalin kami. Agar kami menyajikan edisi ini ke hadapan pembaca sebaik mungkin.

Pandemi covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia sebenarnya begitu lemah, baik secara pribadi, sosial, maupun bernegara. Ketahanan diri, atau imunitas, baik secara fisik maupun finansial diuji dan ditelanjangi. Tubuh manusia begitu lemah. Finansial bukanlah milik manusia.

Tuhanlah pemberi kesehatan. Tuhanlah yang mencukupi rezeqi. Hanya dengan makhluk yang kecil manusia begitu ringkih. Ekonomi *drop*, kekayaan (kepemilikan) yang dibanggakan begitu rapuh.

Begitupun manusia secara sosial. Berkumpul justru menjadi

bencana. Sesuatu yang dilarang, meski atas nama ibadah. Negara pun terlihat terganggu, terutama dari aspek keuangan, pemulihan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup warga.

Pandemi ini menyadarkan bahwa kita begitu tak berdaya. Semoga ini menambah makna fitrah di hari raya idul fitri. Fitrah, suci, seperti baru dilahirkan. Ini linear dengan hikmah atas pandemi ini.

Dengan kesadaran bahwa manusia itu begitu kecil dan lemah, tak ada tempat untuk kesombongan. Untuk itu, saatnya kita rendah hati sesama manusia. Saatnya saling berma'afan. Semoga idul fitri di tengah pandemi, semakin menyempurnakan hakikat fitrah kita semua.

Selamat idul fitri 1441 H, mohon maaf lahir bathin. Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risaalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Akrobat Menggapai Cirebon Bahagia

6 | Rakyat Cirebon Harus Bahagia



16 | PUBLIKA

Cirebon Seperti Bak Sampah?



18 | OPINI

Mampukah Cirebon Menjadi Pusat Wisata Budaya ?



20 | LENSEA

Petani Garam di Ujung Senja?



22 | DINAMIKA KOMISI

"Segera Selesaikan Masalah Aset Desa Kedondong Kidul"

24 | PT Longrich Diminta Selesaikan Perizinan

26 | Terus Gerilya Periksa Limbah

28 | Mengurai Sengkarut Jamkes & Jamsos



30 | PROFIL

Mohammad Luthfi
Berjuang dengan Filosofi Sepeda Balap



34 | INSPIRASI

Bumdes Menyulap Pongok Menjadi Desa Kaya

36 | POTENSI

Menakar Trusmi Menjadi Malioboro Cirebon

Akrobat Menggapai Cirebon Bahagia

Berbagai indikator menunjukkan Kabupaten Cirebon tertinggal. Sulit, namun bukan mustahil, untuk mengejar. Akankah sinergi DPRD dan eksekutif mampu membawa Cirebon berlari cepat?



Mohamad Luthfi tertegun. Menghela nafas panjang. Air mukanya tampak serius memperhatikan paparan Bank Indonesia (BI) di forum pimpinan daerah se-Jabar. Indikator ekonomi dan pembangunan Kabupaten Cirebon cukup memprihatinkan. Tertinggal dibanding daerah lain di Jabar.

“Sepertinya ini akan menjadi tugas berat saya dan bupati. Agar Kabupaten Cirebon bisa berlari cepat mengejar kabupaten/kota lainnya,” ucap sang Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dalam hati kala itu.

Siapa pun, warga Kabupaten Cirebon, sepertinya bakal merasakan dan berpikir yang sama dengan Luthfi. Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, perlu bahu-membahu mengejar keteringgalan.

Lihat saja angka pengangguran di Kabupaten Cirebon tertinggi se-Jawa Barat, mencapai 10,28 persen. Jika angkatan kerja di Kabupaten Cirebon 1,6 juta jiwa, maka pengangguran terbuka sebanyak 164.480 orang.



Sumber BPS Jabar 2019
 “Itu prosentase pengangguran Kabupaten Cirebon ranking pertama se-Jabar, daerah lain masih di

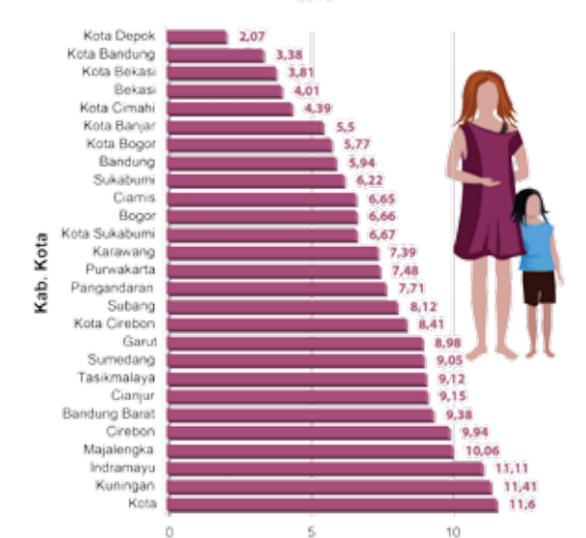
bawah 10 persen, rata-rata di angka 7,99 persen,” urainya.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan APBD belum mendorong produktivitas usaha dan industri, serta pariwisata di Kabupaten Cirebon. “Kita harus kreatif, berinovasi, berakrobat agar selama lima tahun kedepan sektor ekonomi yang menjadi fondasi Cirebon Bahagia bisa semakin kuat,” ujarnya.

Cermin ketertinggalan ekonomi bisa juga dilihat dari data kemiskinan. Prosentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon masuk lima besar Jabar. Pada 2019, menyentuh angka 9,94 persen. Itu berarti ada 217.640 orang di Kabupaten Cirebon yang masuk kategori miskin.

Kondisi kemiskinan dan pengangguran tersebut terlihat linier dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Cirebon yang hanya Rp 15,3 juta per orang per tahun. “Cirebon ranking keempat PDRB terkecil se-Jabar,” tandas Luthfi.

Persentase Penduduk Miskin 2019



Sumber BPS Jabar 2019

Itu artinya rata-rata orang Cirebon berpenghasilan Rp 1,25 juta per bulan. Angka yang kecil. Masih di bawah angka kelayakan hidup, atau upah minimum regional (UMR) Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2,1 juta.

PDRB Kabupaten Cirebon juga masih di bawah rata-rata PDRB Jabar sebesar Rp 30 juta per orang per tahun. Jauh jika dibandingkan Karawang yang mencapai Rp 69,5 juta per orang per tahun.

“Karawang bisa begitu karena punya 8 zona in-

Produk Domestik Regional Bruto PDRB 2019



Sumber BPS Jabar 2019

dustri, ada 2.000-2.200 pabrik. Cirebon harus bisa seperti itu, kita harus mengejar, bekerja keras, yakin bisa kalau semua bersatu,” jelasnya.

Bukan hanya secara ekonomi Kabupaten Cirebon tertinggal, begitupun dari sisi pembangunan manusia. Ini bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Cirebon yang hanya mencapai 68,69. Jauh di bawah rata-rata Jabar yang sudah mencapai 72,03.

Ketertinggalan Kabupaten Cirebon, menurut Pengamat politik Cirebon, Surnita Sandi Wiranata, karena kurangnya inovasi selama sepuluh hingga dua puluh tahun terakhir. Cirebon sepertinya berjalan di tempat. Seolah mengalami stagnansi pembangunan.

Sandi menilai karena selama ini eksekutif cenderung melakukan seremoni, rutinitas, dan pengulangan program saja. “Untuk itu dewan harus mampu membuat inovasi kekinian, menjadi motor perubahan. Kang Luthfi dan anggota dewan kan rata-rata masih muda, mudah-mudahan bisa menjadi energi pendobrak stagnansi,” jelas sandi.

Luthfi sadar betul akan tantangan yang begitu berat. Ia pun menyiapkan visi Cirebon Bahagia sebagai acuan berinovasi. Pertama, ia akan membangun sinergi semua anggota DPRD dan memompakan kinerja sekretariat DPRD. Selanjutnya, berkolaborasi dengan eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kalau hanya melakukan hal biasa, maka hasilnya akan biasa. Kita sudah tertinggal, untuk itu kita harus melakukan hal luar biasa agar bisa mengejar ketertinggalan. Bersinergi, terus berinovasi dan berakrobat membuat terobosan,” tandas Luthfi.

Rakyat Cirebon Harus Bahagia

Bahagia itu jika cari pekerjaan mudah, lingkungan bersih, tidak banjir, jalan mulus, sekolah bermutu, dan sejahtera. Bagaimanakah caranya? Mohamad Luthfi punya jawabannya.



Pembangunan di Kabupaten Cirebon, selama sepuluh tahun terakhir, dirasakan seolah jalan di tempat. Tidak ada perubahan signifikan. Birokrasi juga cenderung melakukan rutinitas dan pengulangan program dari tahun sebelumnya.

Maka, peran DPRD sangat diharapkan. DPRD, yang notabene 74 persen berusia 50 tahun ke bawah, harus menjadi energi perubahan. DPRD harus melahirkan gagasan-gagasan inovatif untuk mengejar ketertinggalan. Tentu,

hal ini juga perlu didukung visi Ketua DPRD yang prima. Untuk mengetahui seperti apa visi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, redaksi **Cirebon Katon** mewawancarai Mohamad Luthfi. Berikut petikannya:



Nelayan Cirebon

Apa Visi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon lima tahun kedepan?

Kita membungkus visi itu dalam satu diksi sederhana, yaitu Cirebon Bahagia. Cirebon bahagia ini maknanya luas. Kita bahagia kalau kita Sejahtera; Jika kita punya jaminan kesehatan; Jika anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas; Jika lingkungan bebas sampah; Jika bebas jalan berlubang; Jika bebas banjir; Jika tidak ada pengangguran; dan kita bahagia kalau tidak ada penduduk miskin di Kabupaten Cirebon.

Bagaimana Mewujudkan Kebahagiaan itu?

Ini tantangan yang luar biasa, berat, dan tidak akan pernah bisa diwujudkan, jika semua masyarakat Kabupaten Cirebon tidak bisa bersinergi. Pemerintah tidak bisa bersinergi, birokrat tidak bisa bersinergi, dan semua mementingkan kepentingan individunya. Saya yakin kabupaten Cirebon akan semakin tertinggal jika seperti itu. Jadi, kuncinya sinergi.

Bagaimana langkah taktis atau misi dalam menggapai visi itu?

Pertama, Perang Terhadap Korupsi. Ketika korupsi sudah menjadi budaya, menjadi sesuatu hal yang wajar, dilakukan oleh sebagian besar dari kita, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai ke tingkat desa, otomatis sistem kenegaraan kita menjadi lumpuh. Kalau sudah begitu jangan berharap perubahan.

Untuk memerangi korupsi, salah satunya dengan perang terhadap jual beli jabatan. Ketika masih ada jual beli jabatan, maka orang baik akan tersingkirkan. Orang yang punya kompetensi akan menepi. Sedangkan, orang-orang yang tidak punya kapasitas, haus akan kekuasaan akan mengisi ruang-ruang itu. Akhirnya sistem akan menjadi lumpuh, dan selanjutnya tinggal tunggu kehancurannya saja.

Kita akan serius mengawasi proses lelang jabatan. Jangan sampai hanya jadi formalitas. Kita juga awasi proses yang dilakukan Baperjakat. Kita pastikan orang mengisi posisi sesuai dengan kapasitasnya.

Jadi melawan korupsi ini paling mendasar yah, selanjutnya apa?

Nah, yang **kedua** kita akan pastikan APBD dan penyusunan peraturan daerah berkualitas. APBD dan Perda harus menjawab persoalan yang ada. Contohnya, APBD sebesar Rp 4 triliun itu bisakah menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan? Ini yang akan kita kawal.

Kan ini alat ukur sederhana. Pengangguran katanya 164 ribu, dan orang miskin 217 ribu orang. Sedangkan produktifitas penduduk cuma Rp 15 juta per orang per tahun. Nah, visi harus diturunkan dalam bentuk target. Target kita, kemiskinannya turun jadi 100 ribu, berarti harus ada 117 ribu orang yang keluar dari garis kemiskinan.

Jika pemerintah menuntaskan pengangguran menjadi 100ribu berarti kan pemerintah harus bisa menciptakan 60 ribu kesempatan kerja baru. Sedangkan produktivitas targetnya Rp 40 juta per orang per tahun.

Dengan tiga indikator tadi kita cek. Program yang dibuat pemerintah dalam RAPBD. Sudah linier belum dengan persoalan-persoalan itu? Jangan sampai program yang diajukan tidak ada kaitannya sama sekali. Kita akan pastikan itu agar APBD maksimal mendongkrak kesejahteraan.

Ini menarik soal optimalisasi APBD, bisa diberikan contoh program apa yang dapat dilakukan untuk mendongkrak kesejahteraan?

Salah satu contohnya, kita harus memastikan kebijakan tentang UKM jelas. Programnya harus membangun inkubator bisnis di setiap Kecamatan. UKM ini terkendala dua hal, pertama akses pemasaran, yang kedua akses permodalan. Nah



Jalan berlubang

pemerintah harus bisa memastikan dua akses ini terfasilitasi dengan baik.

Di bidang pertanian, kalau sekarang produksi beras se-kabupaten 500.000 ton. Bisa ngga dengan intensifikasi, pengairan yang baik, pemilihan teknologi pertanian yang baik, kita tingkatkan menjadi 700.000 ton per tahun. Bisa apa nggak? Harus dipikirkan ke arah situ. Kalau bisa, otomatis PDRB perkapitanya meningkat.

Di sektor kelautan, bisa ngga menaikkan nilai tambah produk? Hari ini ikan dijadiin ikan asin, dijual di pasar. Nilai tambahnya dimana? Nelayan menangkap ikan, ikan dijual. Hanya sebatas itu saja nilai ekonominya.

Kalau nilai ikan yang harganya Rp. 30 ribu – 50ribu, bisa kita ubah ke dalam bentuk tepung ikan, nilai per kilonya bisa meningkat, yang tadinya Rp. 30

ribu menjadi Rp. 80 ribu. Ketika ada kenaikan nilai tambah, produktivitas perkapitanya pun meningkat.

Di bidang industri, kita harus mendorong terbukanya kesempatan kerja. Saya pernah bertanya pada Ibu Bupati Karawang: ada berapa pabrik di Karawang? Kita punya 8 zona industri, ada 2.000-2.200 pabrik. Emang di Cirebon berapa kang? Di Cirebon cuma sekitar 250-an.

Jadi, kita hanya 10% dari industri di Karawang. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan infrastruktur industrinya. Makanya magnet investasi rendah. Artinya kita harus memastikan kebijakan dan APBD yang bisa mendorong pembangunan infrastruktur industri dan investasi.

Bagaimana dengan pembangunan sumber daya manusia?

“

Kita membungkus visi itu dalam satu diksi sederhana, yaitu Cirebon Bahagia

”

Nah, ini yang kita bahas berikutnya. Pilar yang **ketiga**, kita harus meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Saat ini kualitas dan kapasitas SDM di kabupaten Cirebon rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Kenapa rendah? Karena banyak yang nganggur. Kenapa banyak yang nganggur? Karena tidak ada peran negara yang memastikan mereka terfasilitasi produktivitasnya. Kita harus fokus memikirkan tentang pendidikan vokasi, yang langsung terkait dengan kebutuhan.

Kita akan dorong program-program yang membangun daya saing. Berikutnya adalah membangun pendidikan entrepreneurship, ini menjadi sangat penting. Kalau bisa masuk ke kurikulum pendidikan dasar hingga menengah.

Selanjutnya, pilar yang **keempat**: pembangunan infrastruktur. Kita ingin memastikan biaya logistik turun. Sehingga, produksi kabupaten Cirebon memiliki daya saing kuat. Kita ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini linier dengan upaya peningkatan produktifitas.

Jadi, itu semua (perang melawan korupsi, APBD berkualitas,

SDM berkualitas, dan infrastruktur muaranya pada peningkatan produktifitas ya?

Tepat sekali. Jadi ini yang **kelima**: peningkatan produktifitas. Sektor mana saja yang prioritas ditingkatkan? **Pertama**, sektor pertanian. Sawah yang 3 kali panen hanya 6% total luas sawah sekitar 52 ribu hektar. Sawah yang 2 kali panen 52%, Sisanya sawah yang satu kali panen 39%. Ini persoalan serius.

Ironisnya sawah-sawah yang irigasinya baik, malah berganti fungsi lahan. Kita tidak pernah memikirkan tentang pengembangan irigasi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita tidak banyak berharap lebih kalau persoalan air tidak ada solusinya.

Kita pernah berencana membuat waduk baru Cipanundan di Karangwareng tahun 2007, hanya rencana saja. Tidak pernah dieksekusi. Setu Patok yang tadinya memiliki kapasitas 13 juta kilo liter, sekarang hanya tersisa 5 juta kilo liter. Akhirnya produktifitas pertanian menurun drastis.

Intensifikasi juga tidak dilakukan secara serius. Kita ingin produktifitas meningkat. Di struktur PDRB dulu produktifitas pertanian menyumbang hampir 7,8 %, hari ini kalah dengan industri pengolahan. Kita ingin sektor pertanian menjadi primadona baru.

Sektor mana lagi yang perlu ditingkatkan produktifitasnya?

Setelah tadi pertanian yang pertama, sedikitnya ada empat sektor lagi yang jadi prioritas. Yang **kedua** adalah produktifitas UMKM. Kita akan memilah produk UMKM yang bisa diterima oleh pasar untuk didorong dan dikembangkan. Di tahap awal misalnya ada 10 produk UMKM yang di fasilitasi oleh negara untuk dikembangkan pasarnya, dikembangkan permodalanya, di kembangkan daya saingnya.

Dulu telor asin Brebes itu bahannya dari Panguragan dan Kroya, sekarang orang Brebes ngimpornya dari Mojokerto, sehari tiga kontainer. Kenapa? Karena produktivitas di Cirebon rendah. Kalau sekarang produksi telor se-kabupaten Cirebon hanya 10 ribu butir, bisa nggak didorong menjadi 40 ribu butir perhari? Harus bisa.

Peningkatan produktivitas yang **ketiga** industri pengolahan hasil laut. Kita punya garis pantai 71 KM, tapi “seolah olah” kita ini membelakangi laut. Saat ini belum ada industri pengolahan hasil laut berskala nasional.

Sektor **keempat** yang perlu ditingkatkan kapasitasnya adalah pariwisata. Bahkan pariwisata bisa jadi leading sektor untuk mendongkrak UKM dan industri pengolahan. Kabupaten Cirebon punya potensi wisata alam yang menarik, seperti di Pasaleman, Greded. Hanya belum dioptimalkan.

Belum lagi wisata religi, seni, budaya, kuliner, dan wisata belanja. Cirebon termasuk memiliki potensi wisata yang lengkap. Tinggal bagaimana mengintegrasikan itu semuanya. Sehingga bisa meningkatkan kunjungan dan memperlama okupansi.

Sehari orang yang datang ke Gunung Jati itu ada seribu sam-



Bangunan sekolah memprihatinkan

pai dua ribu orang, tapi mereka datang ke Gunung Jati cuma tiga jam. Padahal jika diintegrasikan dengan wisata lainnya bisa menarik. Selain kreativitas, kita perlu memperkuat aksesibilitas menuju destinasi wisata.

Peningkatan produktivitas sektor **kelima** adalah industri manufaktur. Kita mendorong terwujudnya kawasan industri, sehingga membuka lapangan kerja.

Ini kalau benar dijalankan



Sampah terbengkalai mengotori sungai

semua luar biasa, apakah itu cukup untuk membuat Cirebon Bahagia?

Belum, karena perlu dilengkapi dengan program layanan dan pembangunan kemanusiaan. Kita perlu **memastikan jaminan kesehatan** yang paripurna. Kita ingin memastikan semua masyarakat miskin bisa mengakses pelayanan kesehatan kelas tiga dengan gratis. Kita ingin memastikan masyarakat Cirebon sehat. Lingkungan bersih, bebas sampah.

Selanjutnya kita ingin memastikan **kualitas pendidikan** yang baik. Kita akan mendorong guru honorer mendapatkan hak sesuai dengan beban kerja yang dia lakukan. Kita ingin memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang baik.

Terakhir kita ingin **membangun karakter manusia Cirebon**. Ini pekerjaan penting. Karakter orang Cirebon itu harus tangguh, punya daya saing yang kuat, dan positif. Itu semua harus dimasukan ke pendidikan karakter. Kita ingin orang Cirebon akhlaknya baik, pendidikan agamanya juga baik.

Apa Anda yakin ini bisa diselesaikan dalam waktu lima tahun ke depan?

Ya harus yakin. Paling tidak pondasinya sudah kita tanapkan. Butuh berkelanjutan, dan yang terpenting ini bukan pekerjaan DPRD dan bupati saja, ini pekerjaan semua *stakeholders* yang ada di Cirebon.

Visi & Misi DPRD Kabupaten Cirebon

Visi misi ini disarikan dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi

Visi:

Cirebon Bahagia. Indikatornya adalah kesejahteraan meningkat; kemiskinan menurun; pengangguran menurun; PDRB meningkat; jaminan kesehatan; lingkungan sehat, bebas sampah dan banjir; serta akses pendidikan mudah dan berkualitas.

Misi atau langkah mencapai visi:

- Perang terhadap korupsi. Tidak ada jual beli jabatan. Anggaran terserap maksimal.
- Penyusunan APBD dan peraturan daerah

dilakukan secara berkualitas. APBD harus linear dengan peningkatan produktivitas.

- Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM.
- Pembangunan infrastruktur.
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi pertanian, UMKM, hasil laut, industri manufaktur, dan pariwisata. Pariwisata harus jadi *leading sector*.
- Jaminan kesehatan dan lingkungan sehat.
- Peningkatan kualitas pendidikan.
- Pembangunan karakter manusia Cirebon.

Segenap Pimpinan dan Redaksi



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Mengucapkan

**SELAMAT HARI RAYA
IDUL FITRI 1441 H**

Minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir & batin

Membangun Marwah DPRD dengan Perubahan

Banyak yang beranggapan bahwa DPRD hanyalah stempel eksekutif. Mohamad Luthfi berniat akan membuktikan bahwa anggapan itu salah. Seperti apakah caranya?



Sepertinya tidak ringan tugas ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Di satu sisi harus bahu-membahu membangun Cirebon bersama bupati. Di sisi yang lain, ia harus membangun kepercayaan publik terhadap marwah DPRD yang kian pudar.

"Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik itu bukan dengan pencitraan, tapi dengan perubahan. Kita akan fokus membuktikan bahwa perubahan itu nyata, caranya kita akan urai satu per satu, kita kawal satu per satu persoalannya," papar Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi.

Dari sisi pembenahan kinerja DPRD, Luthfi memastikan bahwa DPRD harus solid. Meski berasal dari partai yang berbeda, namun harus punya visi yang sama. "Kita samakan frekuensi anggota DPRD," tandasnya.

Setelah frekuensinya sama, Luthfi akan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil DPRD harus benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Untuk itu menjadi penting menginventarisasi semua persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Selanjutnya kita klasifikasi kita klusterisasi sesuai kadar persoalannya. Selanjutnya kita pilah, dan pilih solusinya yang pas. Ketika kita bisa memahami masalah dengan baik, kita akan punya banyak pilihan solusi yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan persoalan itu," paparnya.

Inventarisasi masalah itu salah satunya dengan membuka saluran komunikasi, agar rakyat mudah menyampaikan persoalan. "Kita akan buka hotline, agar arus informasi dan aspirasi lancar," tandasnya.

Namun demikian, dalam menyelesaikan prioritas persoalan bukan berdasarkan semua aspirasi

“

Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik itu bukan dengan pencitraan, tapi dengan perubahan. Kita akan fokus membuktikan bahwa perubahan itu nyata...

”

yang masuk. Skala persoalannya kan dilihat. Kalau aspirasi itu hanya mengenai sekelompok orang, maka kita akan lebih memilih memprioritaskan menyelesaikan permasalahan orang se-kabupaten.

"Kita akan lebih mendingankan aspirasi. Namun, aspirasi satu orang berbeda skalanya dengan aspirasi seribu orang. Kita akan memprioritaskan hal-hal yang punya dampak masif terhadap masyarakat," jelasnya.

Sebagai contoh, lanjutnya, "Di desa A minta dibangun fasilitas tertentu, nah yang menerima manfaat cuma desa A saja, di saat yang sama kita dihadapkan pada persoalan jaminan kesehatan. Ya, kita bereskan yang jamkes dulu. Kenapa? Karena penerima manfaatnya lebih banyak, ada 2,4 juta orang," rincinya.

Dengan cara pembuatan skala prioritas itu Luthfi yakin bahwa masyarakat akan memahami cara kerja DPRD yang dipimpinya. "Jadi nanti mereka akan



tahu, tidak dikit-dikit menuduh DPRD tak peduli, tak aspiratif, karena kita akan hadir dengan bukti menyelesaikan permasalahan berdasarkan skala prioritas," jelasnya.

Untuk itu Luthfi mengaku akan mengawal DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi). Pengembangan kapasitas kelembagaan harus berpatokan pada tiga hal: pertama, menyusun kebijakan yang pro dengan kesejahteraan rakyat; kedua, menyusun anggaran yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat; dan yang ketiga melakukan pengawasan secara detail.

"Tiga tuisi itu harus produktif. Perencanaan, penganggaran, dan pengawasan harus baik. Untuk pengawasan kita harus punya sistem yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan, artinya kepentingan kita cuma satu: kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Apakah itu cukup untuk membangun marwah dan memompa kinerja DPRD? Tidak. Ada satu elemen penting yang

menurut Luthfi sering diabaikan orang, yakni kinerja sekretariat DPRD. Baginya, tanpa dukungan sekretariat yang handal, maka kinerja DPRD kurang optimal.

Untuk itu, dia mengaku terus berupaya membenahi sekretariat DPRD. "Kita akan dongkrak kinerja sekretariat dewan bisa optimal dalam mendukung kinerja para legislator. Kalau tidak, akan repot. Anggota sudah kecepatan tinggi, setwan-nya masih lambat, kan gak bisa begitu, harus seiring sejalan," paparnya.

Ke depan, Luthfi berharap, setwan juga kreatif dalam membuat program yang mendukung kinerja DPRD, baik langsung maupun tidak langsung. Harus ada terobosan dan inovasi. "Misalnya dalam rangka menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat, setwan membuat survey opini publik, membuat diskusi kelompok, atau diskusi para pakar. Jadi, kita semua harus jadi motor perubahan," jelasnya.



Surnita Sandi Wiranata:

Kuncinya, DPRD Harus Jadi Motor Inovasi

Untuk mengejar ketertinggalan, DPRD harus menjadi motor perubahan, di tengah birokrasi yang stagnan.



Tujuh bulan sudah Mohamad Luthfi memimpin lembaga legislatif Kabupaten Cirebon. Pengamat politik Cirebon, Surnita Sandi Wiranata, menilai rentang waktu itu sangat cukup untuk beradaptasi, dan mengkonsolidasikan baik internal maupun antar lembaga.

Namun demikian, Sandi ber-

harap Luthfi bisa bergerak lebih cepat: menjadikan DPRD sebagai motor penggerak inovasi. Kalau tidak, sulit mengejar ketertinggalan dan mencapai visi Cirebon yang bahagia.

Dengan gaya kepemimpinan yang aktif membuka saluran komunikasi masyarakat, seperti menggunakan media sosial,

kata Sandi, menjadi harapan bagi masyarakat akan perubahan. Sehingga lembaga legislatif mampu menjadi motor penggerak perubahan secara fundamental di pemerintahan Kabupaten Cirebon.

"Dengan gayanya yang bisa masuk bersama masyarakat, saya nilai Luthfi bisa menjadi

“

Dengan gayanya yang bisa masuk bersama masyarakat, saya nilai Luthfi bisa menjadi penggerak motor kelembagaan pemerintahan

”

penggerak motor kelembagaan pemerintahan, di tengah masa krisis kepemimpinan seperti sekarang di Kabupaten Cirebon,” jelas Direktur Riset Konstan ini.

Sosok Luthfi yang berenergi anak muda juga dinilai bisa mendorong perubahan dari hal kecil. Salah satunya, mempublikasikan presensi (kehadiran) anggota dewan. Hal itu menurut Sandi menjadi pembuktian bahwa ia sedang sungguh-sungguh membenahi institusi DPRD.

“Dengan semangat mudanya yang mengedepankan transparansi soal absensi yang ada di legislatif, jadi bisa terlihat mana yang suka bolos dan yang rajin bekerja. Meskipun itu hal kecil, namun saya tangkap itu menjadi sebuah keseriusan Luthfi dalam mengambil gaya kepemimpinan yang terbuka,” paparnya.

Meskipun demikian, lanjut dia, Ketua DPRD harus mampu bersinergi dengan semua anggota dan semua lintas fraksi. Terutama dalam membuat kebijakan penganggaran dengan memperhatikan skala prioritas untuk pembangunan, bukan kepentingan elit semata.

“Tapi Ketua DPRD juga harus

bisa merangkul dan bersinergi dengan anggota DPRD lainnya yang pastinya lintas fraksi, hal ini harus dilakukan agar kebijakan penganggaran dengan skala prioritas bisa tercapai. Jadi praktik kepentingan elite politik bisa dipatahkan demi kepentingan pembangunan bagi masyarakat secara keseluruhan,” tutur dia.

Terlebih lagi saat ini, Sandi menilai kegiatan eksekutif hanya berupa rutinitas dan seremoni, kurang berinovasi. Nah, DPRD sebaiknya mengevaluasi, dengan mengedepankan program-program yang inovatif untuk mempercepat peningkatan IPM, dan kesejahteraan masyarakat.

“Gaya eksekutif itu dari dulu gak pernah berubah dengan selalu membuat gelaran rutinitas yang tidak berinovasi, jadi Ketua DPRD harus segera mengevaluasi secara keseluruhan sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Hal itu untuk mempercepat peningkatan IPM, apalagi ditengah kondisi seperti sekarang sehingga dewan juga harus memikirkan gerak-gerik pemerintah pasca pandemi ini,” bebernya.

Lanjut Sandi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Beberapa persoalan yang bisa menjadi prioritas adalah pengelolaan sampah, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Saya kira DPRD harus bergerak cepat menggunakan tugas pokok dan fungsinya, untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang saat ini,” ungkapnya.

Terlebih lagi Bupati Cirebon yang saat ini, belum memiliki

pendamping dalam menjalankan tugasnya. “Dengan pincangnya sosok pimpinan daerah yang sekarang dijabat oleh Imron karena tidak adanya seorang wakil, hal itu pastinya akan berpengaruh terhadap performa kinerja kepala daerah. Maka dari itu, ketua DPRD harus mampu menggerakkan seluruh anggota DPRD menjadi pihak yang selalu mengingatkan ketika seorang kepala daerah mengambil tindakan yang nyeleneh,” ucapnya.

Kemudian tantangan yang saat ini harus dihadapi oleh seluruh unsur pemerintahan adalah era digital. Perlu terobosan dalam penerapan *e-governement*. Sehingga masyarakat bisa berperan aktif, pemerintahan lebih transparan, ujungnya bisa menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Dengan kemajuan zaman yang serba digital, tantangan yang harus diambil oleh seorang ketua DPRD yakni harus mampu membuka semua persoalan yang berkenaan dengan masyarakat. Maka dengan itu, masyarakat mampu menilai serba-serbi kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama kebijakan yang diambil oleh DPRD selaku pihak yang mewakili masyarakat,” papar dia.

Ia juga berharap, kepemimpinan Luthfi mampu membuat inovasi kerangka kebijakan dalam mengawasi kinerja eksekutif yang selama ini kurang terbuka kepada masyarakat.

“Yang pasti dewan harus mampu membuat inovasi kekinian dalam membuat kerangka kebijakan pengawasan terhadap eksekutif dengan cara membuka corong informasi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari dewan,” tutupnya.

•dto

Cirebon Seperti Bak Sampah?



Tanya:

Saya Cantika (28), hendak menyampaikan persoalan sampah. Apakah Kabupaten Cirebon nyaman dengan sampah? Ataukah memang tempat sampah besar?

Kita sering menjumpai di sudut jalanan, pasar, hingga bibir sungai tumpukan sampah tak bertuan. Sangat mengganggu pandangan

dan kesehatan. Tidak jarang membahayakan pengguna jalan.

Sebetulnya saya lihat sudah mulai ada tindakan untuk menertibkan. Namun dirasa masih setengah jalan. Diperparah dengan perilaku masyarakat yang tidak peka terhadap lingkungan.

Bagaimana upaya preventif dan represif yang dilakukan pemerintah

daerah terhadap persoalan sampah? Karena menurut saya, kebersihan adalah salah satu indikator kemajuan. Sebab kebersihan berimplikasi pada kesehatan.

Semoga pertanyaan dan masukan saya dapat diterima dan segera di eksekusi tanpa menunggu nanti. Terima kasih. •Cantika, Plered.

Jawab:

Terimakasih Cantika atas pertanyaan dan masukannya. DPRD Kabupaten Cirebon juga punya keprihatinan yang sama. Masa sidang tahun ini kami sudah menyiapkan Raperda Pengelolaan Sampah. Ini jadi prioritas DPRD untuk segera diperdakan.

Dengan Perda itu diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi eksekutif mengelola sampah di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kita sama-sama mengawasi pelaksanaan Perda tersebut. Sehingga Cirebon bersih dan nyaman.

Guru Honorer Pertanyakan Kesejahteraan

Tanya:

Semoga kesehatan dan kesejahteraan menyertai para abdi negara, termasuk guru honorer. Profesi mulia (katanya) namun bernasib apa adanya (faktanya). Nestapa guru honorer, begitu kira-kira judulnya.

Saya Didi, telah menjadi guru (honorer) lebih dari lima tahun. Sebuah profesi yang sejak dulu dicita-citakan. Namun kenyataan berbeda dengan apa yang dibayangkan.

Saya menyangka bahwa guru bukan saja mulia sebab tugasnya, namun sejahtera karena abdi negara. Ternyata saya salah, sebab abdi



negara identik dengan ASN. Termasuk kesejahteraannya.

Akhirnya, dengan gaji tidak lebih dari Rp 500 ribu sebulan saya harus memutar otak dan tenaga. Semua agar dapur mengebul dan anak-anak bisa jajan. Tidak peduli orang bilang, "Sudah jadi guru kok tetap serabutan".

Betul, selain sebagai guru honorer saya biasa menerima jasa apapun yang penting halal. Kadang ikut berdagang, terima antar jemput orang, bahkan kuli bangunan. Tentu dilakukan diluar tugas mengajar.

Saya adalah satu dari sekian banyak guru honorer yang bernasib tidak jauh berbeda. Bahkan mungkin saya masih lebih beruntung dari beberapa rekan lainnya. Perasaan beruntung itulah yang menjadi penyemangat agar tetap kuat.

Singkatnya, tolonglah kami. Kami tidak akan merengek agar diangkat menjadi ASN meskipun itu adalah impian besar. Tidak pula berharap gaji sama dengan ASN. Kami hanya berharap, sejahterakan kami sesuai standar hidup layak di Kabupaten Cirebon.

Rp 300 – 700 ribu sebulan itu jauh dari kata layak. Oleh karena itu, sudilah kiranya memperhatikan kami. Bukan kami pamrih, namun ada keluarga yang harus kami penuhi kebutuhannya. Kami sejahtera, pendidikan berjaya.

Demikian, semoga menjadi perhatian. Berharap menjadi sebuah kebijakan demi majunya pendidikan. •Didi, Jamblang

Jawab:

Terimakasih Didi sudah bersurat.

Pencemaran Sungai dan Udara di Palimanan



mereka takut. Maka kepada wakil dan penguasanya lah berharap.

Sebelum semua terlambat. Selagi masih ada orang-orang baik yang menjabat. Sudilah kiranya persoalan eksploitasi sumber daya alam dan pengolahannya harus diperhatikan AMDAL. Mohon ketegasan dari pihak terkait. Lakukan audit dan jangan selesai karena duit.

Demikian semoga dapat ditindaklanjuti. Dari saya, Andri. Warga penikmat asap perusahaan "jalanan". •Andri, Kepuh-Palimanan

Tanya:

Alam yang indah, udara yang bersih, sungai yang jernih. Apakah hanya menjadi sebuah cerita? Eksploitasi tambang dan pengeloannya tampak abai terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kita saksikan sungai yang keruh sepanjang Dukupuntang-Palimanan. Polusi udara di Palimanan Barat karena kepulan asap beberapa pabrik. Juga di beberapa wilayah industri lainnya.

Apakah itu bukan sebuah per-

soalan? Apakah tidak membahayakan? Ataukah memang sudah menjadi semacam kepasrahan, agar dinikmati masyarakat dengan kerelaan?

Kita sepakat, alam dengan sumber dayanya harus diwariskan secara bijak. Sebab ada anak cucu yang harus ikut menikmati kelak. Sebuah pandangan berkelanjutan, bukan sekedar merusak dan menghabiskan.

Sesungguhnya masalah lingkungan sangat sensitif, namun masyarakat cenderung pasif. Sebab

Jawab:

Terimakasih atas informasi dan usulannya. Kami akan teruskan ke komisi terkait agar bisa menindaklanjuti.

Redaksi menerima surat pembaca untuk dipublikasikan. Silakan kirim ke: publika.ck@gmail.com

Dengan melampirkan foto kartu identitas.

Tersedia Hadiah untuk tulisan yang dimuat



Oleh : Ikkal Al Fazri
Mahasiswa Antropologi Pascasarjana UNPAD

Mampukah Cirebon Menjadi Pusat Wisata Budaya ?



Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi destinasi wisata budaya, religi, dan alam. Destinasi ini belum dieksplorasi secara meluas, agar dikenal secara nasional maupun internasional. Cirebon memiliki keragaman suku, dan akulturasi dari berbagai suku bangsa, melahirkan masyarakat yang heterogen yaitu suku Cirebon. Mayoritas penduduk pribumi beragama Islam. Secara historis, masuknya agama Hindu-Budha pada abad ke-4, dan hadirnya bangsa asing ke Cirebon, seperti Belanda, China, Timur Tengah, menambah warna dan menjadi kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Cirebon.

Selain itu, ketokohan para wali di Cirebon sangat memberi dampak yang sangat positif bagi masyarakat dalam menjalani proses kehidupan. Nilai-nilai yang tertanam di dalamnya adalah ramah-tamah, sopan-santun, arif-bijaksana, toleransi, dan gotong royong. Semua hal tersebut tercermin dalam adat-tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat.

Dalam sejarah di Babad Cerbon karya P. S. Sulendraningrat, 1986 menyebutkan bahwa Cirebon merupakan kota yang telah terbentuk sejak abad ke-15 M. Dari sebuah desa nelayan yang tak begitu bermakna, Cirebon kemudian berkembang secara bertahap, dan pada abad ke-16 kota ini telah tumbuh menjadi Ibukota kerajaan merdeka yang dilengkapi dengan keraton, masjid, alun-alun, pasar, jaringan jalan darat dan air, pelabuhan, benteng yang melindungi areal sekitar 50 hektar, serta taman kerajaan baru yang dibangun dua abad berikutnya.

Cirebon juga kental akan berbagai budaya dan tradisi, karena daerah ini menjadi sentral jalur perdagangan, penyebaran agama, masyarakat yang toleran dan ramah-tamah. Dengan keadaan seperti itu, para leluhur memformulasikan budaya dan tradisi, sehingga banyak peninggalan bangunan-bangunan tua, seperti keraton, masjid, petilasan, kelen- teng, gereja, gedung-gedung, stasiun, taman, dan lain sebagainya. Menjadikan ciri khas bagi Cirebon, yang sampai saat ini sebagian masih dilestarikan.

Potensi Wisata Budaya

Itu semua tentu menjadi potensi wisata budaya yang sangat luar biasa. Akan semakin menarik jika pemerintah mengembangkan dan melengkapinya dengan fasilitas seperti halnya destinasi wisata. Ini akan membuat daya tarik terhadap wisatawan baik lokal maupun internasional.

Cirebon juga memiliki potensi wisata religi, di mana terdapat sebuah peninggalan seni budaya dan tradisi meliputi keraton-keraton, makam dan petilasan para wali, bangunan atau gedung kolonial Eropa, tempat beribadah berbagai agama, dan berbagai bangunan tua.

Beberapa peninggalan seni budaya tersebut yang sampai saat ini masih dilestarikan serta terjaga. Ini bisa dijadikan sebuah obyek wisata keraton, obyek wisata ziarah, obyek wisata peninggalan kolonial, dan obyek wisata tempat beribadah berbagai agama.

J.W.K. Bakker (1994) mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang khas insani. Lewat kebudayaan, manusia mengubah alam menjadi lebih manusiawi, berarti memanusiaikan alam.

Sebaliknya, dalam kebudayaan itu manusia mewujudkan diri sehingga mencapai kepenuhan kemanusiaannya atau kebudayaan merupakan penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani. Apa yang diungkap Bakker sejalan dengan apa yang ada di Cirebon. Dari kebudayaan timbullah rasa toleransi terhadap perbedaan, menjadikan Cirebon menjadi kota yang majemuk.

Peninggalan peradaban Islam di Cirebon sangatlah banyak. Kini berpotensi menjadi wisata ziarah diantaranya adalah Makam Sunan Gunung Jati di Gunung Gembung Kecamatan Gunung Jati, kemudian Makam Mbah Kuwu Sangkan di Kecamatan Talun, Makam Nyi Mas Ganda Sari dan Makam Lemahtamba di Kecamatan Panguragan, Makam Syekh Magelung Sakti di Kecamatan Kapetakan, Makam Buyut Trusmi di Kecamatan Plered dan berbagai peninggalan religi lainnya di Cirebon.

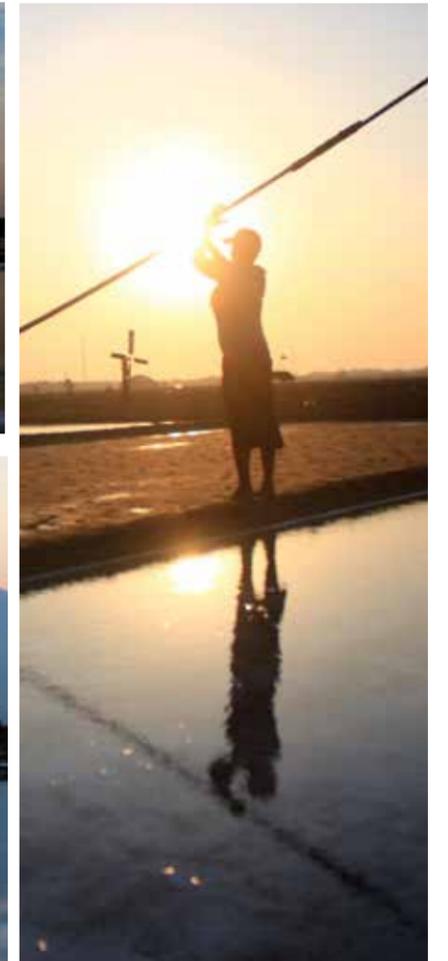
Selain wisata religi seni dan budaya, Cirebon juga memiliki alam yang sangat indah. Alam yang tercipta secara alami dan dapat dinikmati keindahannya. Adapaun beberapa potensi alam yang bisa dijadikan wisata alam yang indah diantaranya yaitu Batu Lawang terletak di Desa Cupang Kecamatan Gempol. Kemudian ada Situ Sedong terletak di Kecamatan Sedong. Setu Patok di Kecamatan Mundu, Banyu Panas Palimanan Gempol, Bukit Groggong di Kecamatan Beber, Hutan Plangon di Kecamatan Sumber, Harapan semua masyarakat kepada pemerintah adalah dengan banyaknya potensi wisata budaya di Cirebon, perlu adanya pelestarian dan perbaikan terhadap peninggalan budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan pendiri Cirebon. Kemudian tempat tersebut dijadikan objek wisata budaya dan obeservasi bagi masyarakat, agar Cirebon semakin dikenal dan dikenang sejarahnya.

Petani Garam di Ujung Senja?

Inilah kisah di senja hari di Desa Bendungan, Pangenan. Akankah menjadi cerita usaha garam yang senja di bibir pantai Cirebon?

Mereka mengeluh harga jual garam turun drastis. Hanya kisaran Rp 100 hingga Rp 500 per kilogram. "Sudah murah sedikit pula yang beli," ujar mereka. Hasil panen sebelumnya, dan panen hari itu hanya menumpuk di gudang.

Mereka berharap pemerintah hadir dengan regulasi pasar yang jelas. Agar indah senja ini tetap menjadi semangat di esok hari dan di sepanjang perputaran matahari. •vik



“Segera Selesaikan Masalah Aset Desa Kedongdong Kidul”



Aset Desa Kedongdong Kidul dengan pemerintah daerah masih menjadi sengketa. Tanah desa yang digunakan untuk jalan itu hingga kini masih belum jelas statusnya. Pemerintah desa berharap bisa diselesaikan segera.

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun mengunjungi Desa di Kecamatan Dukupuntang itu. Mereka menggali informasi permasalahan yang sebenarnya, dan melakukan pengecekan langsung atas aset desa Kedongdong Kidul yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.

Camat Dukupuntang, Khaerudin, menyampaikan bahwa persoalan aset Desa Kedongdong Kidul ini sudah lama dipergunakan untuk jalan oleh Pemerintah Daerah, namun tidak jelas statusnya, apakah disewakan atau ditukargulingkan.

“Maka dari itu saya selaku Camat Dukupuntang sangat mengapresiasi sekali atas inisiatif dari Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon untuk bisa menyelesaikan persoalan ini,” ujar Khaerudin.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman, menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon sebagai mitra kerja dari Pemerintahan berniat memfasilitasi agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan.

“Kita dorong agar ini tidak berlarut-larut, segera diselesaikan. Apakah nantinya ada sewa-menyewa

wa ataukah tukar guling dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan,” terang Abdul Rohman.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Yadi, menyampaikan hal yang sama. Jika ada aset desa yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah harus ada kepastian trasaksinya: sewa-menyewa atau penggantian/tukar guling.

“Saat ini jalan tersebut apakah sudah masuk dalam jalan kabupaten yang sudah di SK kan ataukah masih belum? Harus dipertanyakan status jalan tersebut ke pihak yang terkait, dalam hal ini PUPR sehingga ketika status jalan tersebut sudah jelas dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maka PBB-nya pun bisa dipindahkan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Kejelasan status ini menjadi penting, mengingat banyak persoalan turunan akibat status itu, seperti PBB dan perawatan aset. Terlebih, jangan sampai ada kerugian berkepanjangan dari pemerintah desa.

Desa Kedongdong Kidul memiliki kondisi awal yang cukup indah, dengan kontur pegunungan. Desa ini berniat mengembangkan pariwisata. Desa yang terletak diujung barat Kabupaten Cirebon ini sudah menyiapkan beberapa program strategis untuk mengembangkan wisata desa.

Komisi I Minta Minimarket Dekat Pasar Ditertibkan

Pedagang pasar tradisional mengeluh. Banyak minimarket yang masih beroperasi di dekat area pasar. Tentu saja ini melanggar peraturan daerah. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun bergerak menertibkan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi dasar bagi Komisi I untuk melakukan pengecekan. Kali ini, mengunjungi PT Sumber Alfaria Trijaya, di Kecamatan Plumbon.

Manager License PT Sumber Alfaria Trijaya, Nandar, menjelaskan bahwa ada sebanyak 145 toko modern Alfamart, dengan rincian toko regular sebanyak 123 dan franchise (waralaba) sebanyak 22 toko.

“Dari 145 toko yang ada di Kabupaten Cirebon hanya beberapa saja yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, di antaranya adalah toko Alfamart yang berada di Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Jamblang dan Pabuaran,” ungkap Nandar.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan, mempertanyakan langkah PT. Sumber Alfaria Trijaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ia meminta agar toko yang melanggar aturan segera ditertibkan. Ini penting untuk menghindari konflik di masyarakat.

“PT. Sumber Alfaria Trijaya harus melakukan evaluasi atas keberadaan toko Alfamart yang masih dekat dengan pasar tradisional, karena jelas melanggar aturan,” tegas Sofyan.

General Service Mananger PT. Sumber Alfaria Trijaya, Wisnu, menjelaskan bahwa toko-toko yang saat ini masih berada dekat dengan pasar tradisional masih menunggu masa sewanya habis.

“Setelah sewanya habis, kami tidak



akan membuka toko lagi yang lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional. Selama ini PT. Sumber Alfaria Trijaya juga telah melaksanakan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan pajak-pajaknya,” jelas Wisnu.

Sofwan juga berharap masyarakat untuk proaktif melaporkan jika ada Alfamart lainnya yang melanggar aturan. “Selain di tiga lokasi tadi, Lemahabang, Jamblang dan Pabuaran, mungkin ada juga di tempat lainnya. Untuk itu kami menghimbau agar masyarakat jangan segan melaporkannya kepada kami,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Sofwan, ini tidak berlaku untuk Alfamart saja, tapi juga untuk minimarket lainnya. “Ya kan minimarket banyak, ada Indomaret, Yomart, kalau melanggar ya kita tertibkan. Untuk itu kita minta bantuan dan kerjasama masyarakat untuk proaktif menginformasikan ke kami,” paparnya.

PT Longrich Diminta Selesaikan Perizinan



Sejak 2018 perizinan PT Longrich sudah disoal. Sejumlah warga dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sempat menggelar unjuk rasa di depan DPRD kala itu. Mereka menolak, karena belum ada perizinan, terutama izin Amdal. Februari 2020 kembali bergolak, kali ini ada yang pro dan kontra.

Pihak yang pro berharap Longrich segera beroperasi agar bisa menyerap tenaga kerja. Pasalnya, Longrich mengaku siap menampung 20 ribu tenaga kerja lokal. Sedangkan, pihak yang kontra, lagi-lagi, menyoal perizinan yang belum selesai.

Mendapat laporan masyarakat, Komisi II pun melakukan pengecekan administrasi dan ke lapangan. "Laporan masyarakat pertama soal penutupan akses jalan, yang sebelumnya telah ada dan digunakan sebagai jalan umum dan sekarang ditu-

tup Karena adanya proyek PT. Longrich. Laporan yang kedua soal perizinan," jelas Ketua Komisi II, Mad Saleh.

Setelah melakukan kunjungan, laporan mengenai jalan tampaknya tidak sepenuhnya benar. Kasi Pemerintahan Kecamatan Pabedilan, Komarudin, menjelaskan bahwa selama ini tidak ada penutup akses jalan.

"Tanah tersebut milik masyarakat yang kini telah dibayar Oleh PT. Longrich. Jalan ini masih digunakan, sampai PT. Longrich membuat jalan baru sebagai gantinya," jelas Komarudin.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R. Cakra Suseno, saat kunjungan mengatakan bahwa PT Longrich diduga melanggar aturan. "Jadi sebenarnya kegiatan pembangunan PT Longrich belum diperbolehkan, karena masih dalam proses mengurus perizinan," ujar Cakra.

Meski demikian, sebenarnya DPRD Kabupaten Cirebon tidak berniat menutup atau menghambat investasi perusahaan yang berlokasi di Desa Sidaresmi, Pabedilan, itu. Apalagi PT Longrich direncanakan akan menyerap 20 ribu tenaga kerja. "Akan tetapi aturan harus dijalankan, izin harus ditempuh. Apalagi baru dalam tahap mengurus Amdal," tegas Cakra.

Kasi IMB Dinas PMPTSP Kabupaten Cirebon, Gunarsa, menjelaskan bahwa PT Longrich menempuh perizinan melalui sistem online. Dari rencana perusahaan seluas 60 Ha, izin yang



keluar baru untuk lahan seluas 7 Ha yang ada di wilayah Desa Sidaresmi.

"Padahal perusahaan seluas 60 Ha akan mencakup tiga Desa yaitu Sidaresmi, Babakan Losari, dan Babakan Losari Lor," jelas Gunarsa

Dengan kondisi itulah Komisi II secara tegas meminta agar perizinan dilengkapi terlebih dahulu. "Kegiatan proyek di perusahaan ini harus dihentikan sebelum perizinannya beres 100 persen," tandas Cakra.

Merajut Asa Embung Sumurkondang



Pertengahan 2019, harapan masyarakat Kecamatan Karangwareng sepertinya akan menjadi kenyataan. Banjir yang sering terjadi sejak 1981 akibat limpasan air sungai, akan segera berakhir. Maklum, akhir 2019 Embung Sumurkondang yang diyakini mampu mengatasi banjir akan segera beroperasi.

Embung yang dibangun dari dana APBN itu sejatinya direncanakan akan memberi tiga manfaat: mengatasi banjir; sumber irigasi pertanian terutama pada saat kemarau; dan menarik wisata lokal.

Namun, sayang harapan tinggallah harapan. Banjir tetap melanda. Daya tampung dan simpan air juga tidak lama. Tidak banyak menolong irigasi. Pun juga dengan wisata lokal. Kini, yang ada justru kekecewaan.

Proyek yang bernilai Rp 8,3 miliar itu kini sudah banyak kerusakan. Padahal baru beberapa bulan beroperasi. "Sebenarnya Embung sangat dibutuhkan. Kami berharap ada perbaikan yang bermutu dan berkualitas agar bisa bertahan lama," ujar Kuwu Sumurkondang, Heriyanto.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh, mengunjungi Embung. "Kita cek karena ada laporan masyarakat. Embung Sumurkondang harus menjadi embung yang mampu menjadi pengendali banjir di Kecamatan Karangwareng dan sekitarnya," jelas Mad Shaleh saat mengunjungi Embung.

Sementara Camat Karangwareng, Yusuf, menjelaskan bahwa pembangunan embung secara teknis belum bisa menampung air saat hujan. "Hasil pembangunan embung Sumurkondang belum sesuai

dengan yang diharapkan, dimana tinggi embung hanya 3 meter dan tinggi pintu air embung hanya 1,5 meter tentunya banyak air terbuang atau meluap," kata Yusuf.

Dengan kondisi seperti itu embung yang sedianya diharapkan bisa menampung air untuk irigasi, pun meluap percuma. "Selain tidak bisa mencegah banjir, embung sumurkondang juga belum memberikan manfaat kepada pertanian di wilayah Karangwareng," jelas Wakil Ketua Komisi II, Mohammad Ridwan.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu Mad Saleh berjanji akan menyampaikan ke pihak yang berwenang, yakni Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC). "Saya minta kuwu layangkan surat ke DPRD Kabupaten Cirebon. Maka kami akan bantu semaksimal mungkin meneruskannya, merajut harapan masyarakat," ujarnya.

"Kami berharap kepada BBWSCC selaku instansi yang bertanggungjawab atas pembangunan Embung Sumurkondang agar menganalisa ulang, baik dari sisi daya tampung untuk pengendalian banjir dan irigasi," kata Kuwu Sumurkondang Heriyanto.



Terus Gerilya Periksa Limbah Industri



ndustri itu bak tenaga listrik. Ia mampu menjadi energi penggerak ekonomi, dan mengikis angka pengangguran. Namun, ia bisa menjadi penyengat mematikan, jika tidak dikelola dengan baik dan disiplin. Penyengat itu berupa limbah industri.

Itu pulalah yang membuat Komisi III banjir aduan, tak lama setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk. “Ketika kami baru sah menjadi bagian dari komisi III, kami menerima banyak laporan dari masyarakat soal limbah,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Syahril Romadony.

Atas berbagai aduan itulah Komisi III bergerak cepat. Sejak akhir 2019 aktif melakukan sidak pengolahan limbah industri. “Kami mendorong industri berkembang, tapi kami juga minta agar industri disiplin dalam mengelola limbah, agar tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan,” jelas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto.

Beberapa yang sudah dikunjungi adalah kawasan Kerajinan Tegalwangi, PT Findora Internusa. Belum lama ini Komisi III juga mengunjungi PT Sido Agung Agro Prima (SAAP).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, pengawasan dan pemeriksaan perlu dilakukan secara berkala. “Kita terus *monitoring* tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Di PT SAAP Komisi III menemukan adanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual. “Secara pengelolaan bagus, malah lebih ramah lingkungan, sayang tidak segera melaporkan untuk perbaikan dokumen,” jelasnya.

Menurut Bagian Legal PT SAAP, Wardo, bahwa perusahaan yang memproduksi pakan ternak itu sudah disiplin melaporkan. “PT. Sido Agung Agro Prima sudah menempuh prosedur perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai aturan yang berlaku, pelaporan dokumen UKL/UPL dilakukan rutin tiap semester,” jelas Wardo.

Dua bulan terakhir, PT SAAP dalam memproduksi pakan ternak menggunakan cangkang sawit sebagai bahan bakar, dan dinilai ramah lingkungan dibandingkan Batu Bara. Hermanto menilai jika bahan bakarnya menggunakan cangkang sawit maka dokumen UKL/UPL PT SAAP harus diperbaiki karena sebelumnya menggunakan batu bara.

Menjawab permintaan Komisi III, Wardo menjelaskan akan segera melaksanakannya. “Biasanya kan pelaporan per enam bulan, ini kita baru menggunakan bahan bakar cangkang sawit dua bulan. Belum waktunya laporan, tapi atas masukan ini kami akan segera melaporkan dan mnegubah dokumen,” jelasnya.

Harus Bebas Sampah di 2021



Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Cirebon salahsatunya adalah Cirebon Bebas Sampah dan Cirebon Bebas Banjir. Hal itu tertuang dalam RPJMD 2019-2024. Tnetu saja ini juga menjadi harapan masyarakat.

Atas laporan warga, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan pemantauan langsung kondisi di lapangan. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, menerangkan bahwa terdapat tumpukan sampah liar yang berada di dekat gedung pengujian bermotor Kecamatan Weru.

“Laporan warga, bahwa sampah yang menumpuk tersebut menimbulkan bau yang menyengat dan tentu saja tidak baik untuk kesehatan. Akibat tidak ada penanganan menyebabkan tumpukan sampah yang membukit,” terangnya.

Selain pengawasan yang kurang, sampah menumpuk juga akibat dari kurangnya kesadaran warga. Masyarakat perlu diedu-

kasi. Agar bisa saling membahu mengatasi sampah.

Pemerhati lingkungan dan juga duta sampah Jawa Barat, Yoyon Suharyono, mengatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon harus ditata hingga tingkat desa. “Pengelolaan sampah sudah sangat parah. Tidak hanya di tataran Kabupaten Cirebon dalam penyediaan TPA yang bermasalah. Di tingkat TPS juga sangat kacau,” ujarnya.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan penanganan sampah dengan cara pengangkutan sampah yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan kendaraan dua atau tiga mobil Dinas Lingkungan Hidup.

“Pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup tidak membuahkan hasil dikarenakan jumlah volume sampah yang semakin banyak,” jelas Dedi mewakili Dinas Lingkungan Hidup.

Dampak dari tumpukan sampah liar tersebut dapat mengakibatkan banjir ketika sedang

musim penghujan. Menurut pedagang yang tidak jauh dari lokasi sampah tersebut, Ningsih, menceritakan bahwa “akibat tumpukan sampah liar para pedagang merasa dirugikan, baunya menyengat dan membuat pengunjung pasar tidak nyaman karena lalat hinggap di makanan,” ungkapnya.

Pedagang dan warga sekitar berharap agar secepatnya dibersihkan dan diratakan serta melakukan pemagaran serta tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Tak hanya di Weru, sampah ini sudah menjadi masalah Kabupaten Cirebon. Untuk itu Hermanto meminta agar eksekutif berkomitmen membebaskan Cirebon dari sampah. “Harus ada komitmen. Bukan sekadar slogan di tahun 2021, Kabupaten Cirebon terbebas dari sampah. Wacana pengadaan TPAS pun harus serius dieksekusi,” kata Hermanto.



Mengurai Sengkarut Jamkes & Jamsos



Jaminan kesehatan seolah menjadi masalah yang tidak pernah berhenti. Salah satu yang kunjung terselesaikan adalah validitas data. Masing-masing instansi memiliki data. Tumpang tindih, tidak sinkron, hingga data fiktif.

“Kami terus bergerak dengan melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, agar bisa ditindak lanjuti bupati. Jaminan kesehatan harus segera diselesaikan, begitu pula dengan jaminan sosial,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Rasida Edy Priyatna.

Rasida menjelaskan pada 2019 sampai awal 2020 terdapat 160.000 data BPJS yang dibekukan dan 40.000 data ganda. “Dalam data di BPJS, satu orang tapi kebagian dua, datanya ada tapi orangnya sudah meninggal. Padahal JKN itu dari APBD kenapa orangnya tidak bisa diganti, atau kalau tidak, dikembalikan ke APBD, kan buang biaya,” lanjut Rasida.

Jadi, menurut Rasida, masalah utamanya adalah data. “Data di Dinsos, Dinkes, Disdukcapil dan BPJS tidak ada sinkronisasi data. Maka kami mendorong adanya *Single Data System*,” tandasnya.

Belum tuntas masalah Jamkes, muncul pandemik covid-19. Masalah Jamsos muncul. Lagi-lagi soal data. Komisi IV

pun kembali mengundang Dinas Sosial. Membahas bantuan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak pandemik. “Kita menemukan datanya carut-marut dan tidak beres,” ujar Rasida.

Validitas data menjadi kunci penyaluran bantuan tepat sasaran. Secara administrasi ketidakvalidan data menyulitkan proses pencairan. “Kalau datanya belum valid, NIK nya belum sama, maka akan dicoret karna semua bantuan ada disitu, baik PKH, BPNT, KIS, KIP,” urainya

Di sisi yang lain masyarakat berharap bantuan cepat disalurkan. Keterlambatan data juga bisa berakibat fatal: Cirebon dicoret dari daftar. “Kalau kita lambat, nanti dikhawatirkan dari provinsi akan mengalihkan bantuan terlebih dahulu ke kota atau kabupaten yang datanya sudah beres,” jelasnya.

Oleh karenanya Rasida berharap, semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dengan bekerja secara maksimal, tidak saling menyalahkan satu sama lain. “Kami juga meminta media dan masyarakat untuk membantu kami dalam hal kontrol sosial. Semoga permasalahan ini bisa terselesaikan secepatnya dengan baik,” pungkasnya, kepada Cirebon Katon.

DPRD Desak Keterbukaan Data Penerima BPNT



Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos di Kabupaten Cirebon terus dirundung masalah. Mulai dari dugaan data invalid hingga banyaknya permainan di lapangan.

DPRD Kabupaten Cirebon menilai akar masalahnya adalah tidak adanya keterbukaan data. Untuk itu Komisi IV mendorong keterbukaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial. Di lapangan banyak ditemukan praktik pengepulan Kartu peserta BPNT oleh beberapa e-Waroeng.

Dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Dinas Sosial, Bank BNI, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK,) diharapkan semua terbuka dengan data. Pasalnya, legislatif belum menerima data BPNT dari Bank BNI.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Zaenudin Budiman agar BNI terbuka. “Alasan BNI, data kami terima dari BNI pusat. Kita terima jadi. Sementara saat dimintai data terkait KPM, pihak BNI masih tertutup. Tapi, kami tetap akan mendesak pihak BNI untuk membuka data KPM ke kita untuk disampaikan ke publik,” kata Asep.

Senada disampaikan anggota komisi IV lainnya, Aan Setiawan, mengatakan, dari awal berbagai persoalan mengarah ke BNI. Mulai dari ketersediaan alat, data penerima, kartu yang *trouble* dan lainnya.

Padahal, BNI tugasnya hanya untuk menyalurkan saja.

“Apakah BNI punya kewenangan untuk menentukan siapa penerimanya? Atau berhak menentukan si A, double data, sehingga kartunya langsung tidak bisa digunakan. Persoalan-persoalan tersebut yang ditemukan di lapangan,” jelasnya.

Sementara, Dinsos dan petugas TKSK mengarahkan persoalan itu ke BNI. Artinya, persoalan seperti ada di BNI. Kalau tidak sanggup, masih banyak bank lain yang kiranya layanannya bisa lebih maksimal.

Menanggapi hal tersebut, salah satu perwakilan BNI menegaskan, pihaknya tidak berhak memvonis siapa saja KPM yang berhak menerima bantuan. Karena, data itu berasal dari Kemensos. “Kami tidak punya hak untuk itu. Kami hanya menyalurkan saja,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Daerah TKSK, Eka Wildanu, mengakui masih ada praktik pengepulan kartu. Sebab, tidak sedikit warga yang tidak paham tentang teknis bantuan yang digulirkan pemerintah pusat itu.

“Mungkin sejumlah KPM yang berusia lanjut dikhawatirkan pada saat melakukan transaksi salah memasukan PIN. Itu mungkin yang membuat kartu dikoordinir di e-waroeng,” ungkapnya.

Mohamad Luthfi Berjuang dengan Filosofi Sepeda Balap

Terlunta di negeri orang, dan tempurung lutut retak tak menyurutkan semangatnya untuk menjadi yang tercepat.



“a kaget, saat sang ayah memberinya sepeda. “Kenapa sepeda balap?” gumamnya dalam hati. Maklum, teman sebayanya kala itu kebanyakan menggoes BMX.

Luthfi kecil pun mencobanya. “Hemmm asyik juga.” Ia mulai menyukai sepeda balap itu. Siapa sangka, justru filosofi sepeda balap itulah kelak yang membuatnya menjelajah dunia. Bahkan, mengantarkannya menjadi ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Setelah mencoba sepeda itu, hari-harinya adalah perjalanan. Menjelajah kota Pontianak dan daerah sekitarnya. Cukup berani untuk ukuran pelajar yang bersekolah di SMP Negeri 3 Pontianak ini.

Jenis sepeda balap juga membuatnya selalu mengayuh secepat yang ia bisa. “Gak enak aja kalau pelan,” ungkap pemilik nama lengkap Mohamad Luthfi ini.

Penyesuaian, terjatuh, terluka adalah hal biasa. “Laki-laki kalau tidak ada bekas luka karena bermain itu kurang macho,” katanya berseloroh.

Dengan sepeda itu pula lah ia bersama sahabatnya mengunjungi seorang teman perempuan. Kala itu sudah mulai tumbuh perasaan menyukai lawan jenis. Meski awalnya menemani sohib yang menyukai perempuan itu, Luthfi merasa senang karena ternyata sang perempuan justru menyukainya.

“Zaman semono kan ketemu bae wis seneng bro (waktu itu hanya ketemu saja kan sudah senang ya),” ungkapnya. Perasaan berbunga itulah yang membuat dua sahabat asyik berbincang kala bersepeda saat pulang.

Hingga mereka tak sadar jalan yang harusnya berbelok, namun kemudi tetap lurus. Keduanya pun terjungkal masuk ke dalam



“
Mungkin itu ya maksud ayah saya membelikan sepeda balap agar terus bergerak, berkompetisi dan cepat”

parit. Kapok Kang? “Enggak lah, itulah seninya *travelling* (perjalanan),” sergahnya.

Rintangan dan ujian dalam pengembaraan seolah penyedap baginya. Filosofi sepeda balap yang mengajarkan dirinya untuk selalu ‘berjalan menjelajah dan menjadi tercepat’ terpatri kuat. “Mungkin itu ya maksud ayah saya membelikan sepeda balap agar terus bergerak, berkompetisi dan cepat,” tandasnya.

Menjadi tercepat itu pulalah yang membuat ia ketika mahasiswa sudah berpenghasilan sendiri. Menjadi entrepreneur ketika teman-temannya masih asyik dengan tugas kuliah. “Tahun 1997, saya dapat proyek digitalisasi perpustakaan senilai Rp 34 juta, dapat untung separuhnya. Saya belikan mobil kijang,” paparnya.

Dengan mobil itulah mahasiswa STT Telkom itu memulai pengembaraan baru: menjelajah nusantara. “Waktu itu sih hingga ke Sumatera, Bali, Madura. Kalau sekarang sih alhamdulillah hampir semua wilayah Indonesia sudah dikunjungi.”

Bagaimana dengan menjelajah dunia? Adakah pengalaman yang unik? “Ada, terlunta-lunta di negeri orang sebulan lebih,” sergah pria berkacamata ini.

Usai lulus kuliah, 2003. Di tabungannya ada Rp 12 juta. Ia berniat mengunjungi Arab Saudi untuk umroh. Bukan cara biasa yang ia pilih, seperti lazimnya orang melalui biro travel.



“Saya urus passport, visa, dan tiket sendiri. Tentu saja cari penginapan sendiri. Istilah gaulnya umroh *backpacker*. Berangkat juga sendiri, namanya juga bujangan,” paparnya.

Tiba di Mekkah ia langsung menunaikan ibadah umroh. Setelahnya, diisi ziarah dan menjelajah. Dari satu tempat bersejarah ke tempat bersejarah lainnya. Menginap di rumah pekerja Indonesia ke rumah pekerja lainnya. Kurang lebih, 24 hari ia keliling Mekkah.

Puas di Mekkah ia pindah ke Madinah. Ziarah ke Masjid Nabawi. Beberapa hari di Madinah, ia bertemu dengan orang Mesir. Pria itu meminta tolong agar diberikan 100 dolar AS. Ia kehilangan tas. Tak bisa membayar hotel dan membeli tiket pulang.

Ia pun membantu pria Mesir tersebut. Sambil berpesan agar hati-hati menjaga tas. Tidak disangka, nasihat itu sejatinya untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya justru ia yang kehilangan tas.

Saat berwujud, tas yang tidak pernah

lepas dari pinggang itu ia letakkan di tembok persis di atas kran. Usai berwujud, tas itu raib. Inilah awal ia memulai perjalanan penuh ketidakpastian. “Pasport, tiket, dompet, kartu perbankan, uang, dan ponsel hilang semuanya,” paparnya.

Ia pun hidup dari bantuan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, ancaman terbesar adalah tidak memiliki identitas (pasport). Hukum di Arab Saudi, hal itu bisa berujung penjara, jika ia tidak mampu menunjukkan identitas pengantinya.

Tak ada pilihan, ia pun bergegas menuju Jeddah, mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Selain menghindari ancaman hukuman, passport diperlukan untuk mencetak kembali tiket, mengganti yang hilang.

Sayang, begitu sampai lokasi, ia baru tahu KBRI tutup. Buka lagi 10 hari setelah Idul Fitri. Informasi awal tiket bisa dicetak lagi maksimal H+7. “Tapi mau gimana lagi, harus menunggu KBRI buka,” jelasnya.

Setelah passport ditangan, perjuangan be-

lum berakhir. Untuk meninggalkan Arab Saudi, ia harus mengantongi surat *exit permit* (izin keluar). Surat itu akan dikeluarkan dengan syarat memasang iklan kehilangan di koran. “Dengan bantuan TKI saya pun pasang iklan, dan menggantungnya untuk dijadikan lampiran pengajuan *exit permit*,” paparnya.

Exit permit akhirnya keluar H+20. Dengan berbekal doa dan optimisme ia menuju bandara. Lagi-lagi harus kecewa. Tiket dinyatakan *expired*.

Teman-teman TKI yang mengantar berinisiatif untuk patungan, membeli tiket baru. Uang terkumpul 900 real, sementara harga tiket 1.600 real. “Tidak cukup untuk beli tiket baru, saya meminta teman TKI untuk pulang saja. Saya sendirian di bandara sambil berpikir gimana caranya pulang,” jelasnya.

Setelah melakukan loby dengan biro travel dan pihak bandara sampai dengan 15 hari selama di Jeddah, akhirnya tiket bisa diaktifkan kembali. Untuk menghindari perdebatan di Bandara maka proses *check in* harus diakali, dengan menitipkan proses *check in* tersebut melalui warga Saudi yang akan *travelling* ke Indonesia. Ternyata cara itu efektif dan bisa pulang.

Perjuangan, optimisme, kreativitas untuk memenangi tantangan model sepeda balap yang ada dalam dirinya, lagi-lagi membuatnya menjadi pemenang. Meski penuh perjuangan, dan harus melalui tahapan jatuh bangun.

Semangat yang sama pulalah yang mengantar ia menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Tersisih dalam satu kontestasi politik tak membuatnya patang arang. Justru semakin membuatnya matang.

Bagaimana kini setelah ia menjabat sebagai ketua DPRD? Sepeda balap masih menjadi teman setianya. Bahkan, membantu tugasnya. “Tiap Jumat saya nggoes keliling Cirebon,” ungkapnya.

“Dengan bersepeda saya merasa lebih dekat dengan masyarakat. Bisa masuk ke pelosok. Menemukan persoalan yang tersembunyi, seperti jembatan antar-desa yang sudah bertahun-tahun ambruk. Intinya dengan sepeda saya belanja masalah.” Paparnya.

Lagi-lagi, dalam perjuangan selalu ada cobaan. Begitu juga Luthfi dan sepeda balap. Sabtu malam, 29 Februari 2020, usai berkunjung dari Ponpes Bina Insan Mulia, ia terjatuh. Sepeda balapnya masuk ke lubang selebar 30 sentimeter di jalan aspal daerah Sindang Jawa.

“Jalan gelap, tidak ada lampu jalan, tidak terlihat kalau ada lubang,” jelasnya. Ia pun harus dirawat di rumah sakit dalam beberapa pekan. Ada 18 jahitan di bagian pelipis kanan, dan 3 jahitan di bagian kepala belakang. Selain itu, ada tiga retakan di tempurung lutut kaki kanannya.

Retak tulang itulah yang membutuhkan proses penyembuhan cukup lama. Hingga kini ia masih berjuang agar bisa berfungsi normal. “Alhamdulillah sudah bisa jalan tanpa bantuan, meski belum bisa nekuk sepenuhnya,” jelas ayah tiga anak ini.

Luka dan dampak yang cukup serius. Apa masih akan nggoes lagi Kang? “Tentu dong, udah gak sabar nih pengen segera balapan,” ucapnya sambil mengelap debu di sepeda balap yang sudah dua bulan tak tersentuh.

Hemmm...emang mau balapan sama siapa sih Kang? •mln





Bumdes Menyulap Ponggok Menjadi Desa Kaya

Jika orang kampung tahu negara lain itu biasa. Kalau desa terpencil dikenal mancanegara itu baru luar biasa. Itulah Ponggok yang kini mendunia.

Sepuluh tahun lalu Ponggok hanyalah desa termiskin di Jawa Tengah. Tak banyak yang mengenalnya. Kini, desa di Kecamatan Polanharjo, Klaten, itu menjadi desa kaya. Terkenal pula di mancanegara.

Adalah Junaedi Mulyono, sang kepala desa, yang melakukan terobosan dan cerdas mengembangkan potensi. Um-

bul (mata air) yang sebelumnya hanya digunakan untuk kebutuhan air bersih, ia sulap menjadi wisata.

'Desa wisata air' begitu-lah mereka mem-branding diri. Nama Ponggok pun semakin berkibar. *Dailymail*, media kenamaan Inggris, membuat laporan khusus. Bahkan, liputan itu dilengkapi dengan video bawah

air yang menakjubkan. *South China Morning Post* juga membuat liputan yang sama.

Ponggok pun membuka mata dunia. Wisatawan semakin membanjir. Devisa mengalir. Jika dulu banyak pemuda menganggur, kini tiada lagi. Bahkan ibu rumah tangga pun diberdayakan. Dahsyatnya lagi, banyak warga desa yang menjadi peme-

gang saham.

Kok bisa? Tentu saja bisa. Bumdes adalah kuncinya. Pada 2006, sebelum Mulyono menjabat kepala desa, Pendapat Asli Desa (PAD) hanya Rp 80 juta. Setelah menjabat naik Rp 120 juta. Namun ia tidak puas, perlu ada motor pendobrak bisnis. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi pilihan. Ia dirikan pada 2009.

Bumdes Tirta Mandiri. Nama yang mereka pilih. Bidang garapannya mengelola umbul menjadi obyek wisata selam air dangkal (*snorkeling*).

Mulyono menjelaskan alokasi dana desa salah satunya digunakan untuk pengembangan Bumdes. Dia merinci, anggaran dana desa pada 2015 sebesar Rp 277 juta digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, antara lain jalan desa, sanitasi, hingga MCK sebanyak 50 unit.

Di 2016, anggaran meningkat menjadi Rp 622 juta. Penggunaannya tetap untuk infrastruktur dasar. Sedangkan pada 2017, anggaran sebesar Rp 634 juta

digunakan membangun saluran drainase 504 meter, infrastruktur jalan 136 meter, area parkir seluas 945 meter.

Tidak hanya itu, juga melibatkan warga desa untuk menjadi investor. Dari sekitar 700 keluarga di Desa Ponggok, 430 keluarga menjadi investor, atau sekitar 76%. Nilai investasinya sekitar Rp 5 juta per keluarga. Bagi hasil yang diperoleh berkisar 7-15 persen per bulan. "Tergantung pada tingkat kepadatan pengunjung," ujarnya.

Pada 2016, PAD Ponggok sudah mencapai Rp 10 miliar, 2017 sebanyak Rp 12 miliar, dan terakhir 2019 sudah mencapai Rp 16 miliar. Sungguh angka yang luar biasa.

Pada Expo 2017 Kementerian Desa PDTT di Bukit Tinggi Ponggok dinobatkan sebagai Desa terbaik dalam hal pengelolaan Bumdes. Pelibatan masyarakat dan transparansi membuat program pemberdayaan berjalan efektif.

Kini, Bumdes Tirta Mandiri yang memiliki tiga jenis usaha. Pertama, Umbul Ponggok, meru-



pakam wisata air alami yang digunakan untuk snowkling dan diving. Kolam berukuran 50 x 25 juga bisa digunakan sebagai tempat untuk foto *prawedding*.

Kedua, Toko Desa Sumber Penguripan. Toko ini melayani kebutuhan warga sejak Juli 2016. Toko ini juga bertindak sebagai distributor bagi UMKM warga Ponggok. Sumber panguripan juga bekerjasama dengan perbankan dalam penyaluran kredit dan transaksi perbankan lainnya.

Ketiga, Ponggok Ciblon. Sesuai namanya menjadi tempat untuk "ciblon" atau anak-anak bermain air.

Inovasi terus dilakukan warga Ponggok. Mulyono kini sedang mengembangkan aplikasi teknologi informasi. Ia menggandeng anak-anak muda warga desa. *Smart village* atau desa pintar menjadi target mereka.

Jika Ponggok bisa, maka juga bisa bagi desa-desa yang lainnya. Saatnya Bumdes menjadi motor perubahan dan benteng ekonomi desa. •fal

Menakar Trusmi Menjadi Malioboro Cirebon

Sama seperti Malioboro, Trusmi punya nilai sejarah dan keluhuran seni budaya. Akankah Trusmi berwajah seperti Malioboro?



Wacana Kawasan Wisata Batik Trusmi (KWBT) bakal direvitalisasi seperti kawasan Malioboro, Yogyakarta, sudah mengudara sejak 2017. Namun, hingga kini masih menjadi wacana. Sejauh manakah potensinya? Apa sajakah tantangannya?

Wacana itu muncul seiring dengan rancangan pemerintah Jabar yang menetapkan Kawasan Metropolitan Cirebon Raya. Pertimbangan kedua, karena geliat ekonomi KW-BT cukup berkembang.

Jika, awalnya dikenal sebagai sentra batik, kini sudah mulai melebar ke cinderamata, seni,

dan kuliner. Salah satu faktor pemantik, menurut Rukadi, Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, adalah penetapan Unesco bahwa batik sebagai warisan budaya nonbendawi pada 2009.

Jika sebelumnya hanya ada 55 pengrajin batik dan beberapa workshop saja, kata Rukadi, kini sudah menjamur. Bahkan, beberapa pengusaha mengembangkan konsep terpadu antara pusat belanja, kuliner, dan seni budaya.

Di desa Trusmi saja, jumlah tenaga kerja yang mempunyai keahlian membatik, baik membatik pola desain awal, mence-

cek, dan menembok sudah lebih dari 3.000 orang. Workshop melewati angka 500-an, dan showroom lebih dari 75.

Nina (35), pengunjung asal Bandung, berpendapat bahwa Trusmi punya daya tarik. "Makanya saya kesini, apalagi di Trusmi memiliki situs bersejarah yang tidak semua daerah memiliki," jelasnya

Namun demikian dia mengeluh bahwa potensi saja tidak cukup, perlu diimbangi pembenahan. "Saya sudah beberapa kali kesini, dan sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan terutama soal penataan akses menuju lokasi," tutur dia.



“
Trusmi memiliki situs bersejarah yang tidak semua daerah memiliki
”



Selain jalan rusak, ruas jalan juga sempit, akibat tidak terturnya pedagang kaki lima. "Karena tidak tertata kan kesannya jadi kumuh," tandasnya.

Bagaimana tanggapan pedagang kaki lima yang dianggap sebagai biang macet dan kekumuhan? Rokhmat (32) pedagang es buah justru mengeluhkan kemacetan. "Kita dengan senang hati jika ditata dan ditertibkan, kalau macet kan orang juga males datang kesini," jelasnya.

Dari sisi para pemangku kepentingan sebenarnya tidak ada masalah, malah mendukung. Kondisi seperti ini tentu akan lebih memudahkan untuk segera dilakukan penataan.

Selain penataan pedagang kaki lima, jika dibandingkan dengan Malioboro apa yang masih kurang dari Trusmi? Mari

mengupas ini dari persamaan. Trusmi dan Malioboro sama-sama memiliki nilai sejarah, seni, dan budaya. Geliat ekonomi sudah tumbuh. Dari sisi pemasaran Trusmi mulai dikenal.

Kini tinggal menata, melengkapi infrastruktur pendukung, dan memompa pemasaran. Secara kasat mata infrastruktur pendukung yang perlu ada adalah lapangan parkir yang memadai. Harus bisa menampung puluhan bus. Karakter wisatawan nusantara biasanya melancong secara rombongan.

Untuk meningkatkan okupansi wisatawan perlu didukung dengan fasilitas penginapan seperti hotel dan hostel. Sebagai daya tarik pendukung dihadirkan pentas seni secara berkala dan terjadwal.

Menata kawasan perlu per-

lu melibatkan semua pihak. Dari sisi pemerintah ini adalah pekerjaan lintas sektoral. Perlu melibatkan beberapa SKPD, diantaranya Disparbudpora dan Bappelitbangda.

Namun melihat potensi dan kesamaan visi para pemangku kepentingan, harusnya Trusmi bisa segera seperti Malioboro. Perlu segera ada *grand desain* atau *Detail Engineering Design* (DED), yang tentu saja menampung semua aspirasi.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi pun bersemangat agar Trusmi segera menjadi kawasan andalan yang menyambut wisatawan. "Kami akan mendorong dan bersinergi dengan eksekutif agar ada langkah-langkah yang jelas, dan wacana itu tidak lagi jadi wacana, tapi segera terwujud," tandasnya. •suf/tho

Mohamad Luthfi



Ujian Gotong Royong

“...pandemi ini sebenarnya merupakan ujian gotong royong...”

Notifikasi di WhatsApp Group terus tak berhenti, bersahutan. Penasaran? Gerakan kepedulian melawan covid-19 berseliweran. Sepertinya tidak ada komando, tidak ada yang menyuruh. Hanya bermodal kesadaran dan gerak hati.

Mulai dari penggalangan dana, alat pelindung diri (APD), disinfektan, hingga sembako mereka kumpulkan. Tujuan mereka membantu tenaga medis, keluarga korban, hingga pencegahan penyebaran.

Hari-hari berlalu. Sebaran covid-19 semakin meluas. Korban semakin banyak. Dampak ekonomi tak terhindarkan. Kebutuhan dasar hidup (pangan) masyarakat terganggu. Gerakan gotong royong pun makin luas.

Bukan lagi sekadar ajakan mengumpulkan bantuan, seruan gotong royong pun bertambah: lihatlah tetangga sekitarmu, dan bantulah jika mereka membutuhkan.

Saya pun menyambutnya dengan semangat dan senyum. Tak lupa turut merespon ajakan kepedulian tersebut. Luar biasa. Inilah Indonesia. Punya gotong royong.

Meski demikian, pandemi ini sebenarnya merupakan ujian gotong royong. Bukan hanya dalam bentuk kepedulian untuk saling membantu, tapi juga menjalankan tugas sesuai perannya.

Bagi masyarakat umum, beraktivitas dari rumah saja itu gotong royong. Memakai masker, hidup bersih, tidak berkerumun itu juga gotong royong.

Bagi korban dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi, tidak menyerebot dan berebut bantuan adalah gotong royong. Jika menyerobot, maka ia telah merampas jatah korban lain yang juga sangat membutuhkan. Jiwa gotong royongnya dipertanyakan.

Apalagi, jika penerima bantuan itu sebenarnya masih tergolong mampu. Bukan orang yang terdampak secara ekonomi akibat covid-19. Semoga

berbagai macam bantuan tersebut, baik dari pemerintah, swasta, maupun perorangan, tidak mengikis jiwa gotong royong mereka. Semoga tidak mengubah kebiasaan tangan di atas menjadi tangan di bawah.

Bagi yang bertugas menyalurkan bantuan, baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, hingga pusat, menjalankan tugas dengan baik adalah gotong royong. Jika bersantai, apalagi menyalahgunakan bantuan, itu pengkhianatan. Berkhianat terhadap jiwa gotong royong, dan terhadap mereka yang telah bergotong royong.

Saya masih menyaksikan, di tengah kunjungan kerja, ada masyarakat yang berebut, tidak disiplin, bahkan memanipulasi bantuan. Prihatin, sedih, dan jengkel bercampur.

Namun, yang tak kalah menjengkelkan adalah menyaksikan petugas yang bersantai, saat masyarakat berharap layanan cepat belum mengambil peran maksimal.

Bahkan, cenderung tak acuh. Seolah tidak ada asa untuk segera membantu, mencairkan bantuan. Benar-benar *bikin senewen*. Ia tak paham, jika bekerja dengan baik adalah bagian dari gotong royong.

Gotong royong adalah perkawinan dua sila Pancasila: persatuan (sila ketiga) dan solidaritas sosial (sila ke-5). Jika hari-hari sekarang kita menyaksikan masyarakat yang tidak disiplin atau saling berebut, maka itu ujian gotong royong. Ujian bagi Pancasila.

Jika kita menyaksikan pemerintah atau petugas negara yang mengambil kebijakan jauh dari kepedulian dan perlindungan terhadap rakyat, maka pondasi dan pilar negara sedang diuji. Gotong royong, Pancasila, dan penegakan Pancasila sedang diuji.

Mampukah kita melewati ujian gotong royong ini? Harus optimistis: mampu! Caranya? Mudah: cukup bergotong royong sesuai perannya. Itu saja.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



Ikin Asikin, S.Sos., M.Si.
Sekretaris DPRD Kab. Cirebon



Wawan Siswandar, SE, M.Si.
(Plt) Kabag Umum DPRD Kab. Cirebon /
Kabag Keuangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. Raden Chaldir Susilaningrät
Kabag Persidangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. H. Sucipto, MM.
Kabag Perundang-undangan DPRD Kab. Cirebon

Mengucapkan Selamat

Hari Raya Idul Fitri

1 Syawal 1441 H

Minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir & batin



**PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**



H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Mengucapkan Selamat

Hari Raya Idul Fitri

1 Syawal 1441 H

Minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir & batin